

Militer Mempengaruhi Kekuasaan Politik Pasca Penggulingan Perdana Menteri
Yingluck Shinawatra di Thailand

Millatina Nur Husna

Dr. Nur Azizah , M.Si

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Millatinanurhusna@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about Military Influence in politics after the overthrow of Prime Minister Yingluck. In 1932 was the beginning of the history of the military coup until 2014 where Yingluck Shinawatra was overthrown on corruption charges. In addition to knowing the political conditions under military rule, how successful the military is in controlling politics and the frequent occurrence of corruption in Thailand. This study uses a qualitative methodology in the form of secondary sources from books, journals and websites. In this study it was found that the military had considerable influence in politics in Thailand, which proved to be a frequent coup. In addition, corruption that often occurs causes the military to take power and want to save the country.

Keywords: Political , Military, Intervention, Corruption

PENDAHULUAN

Thailand merupakan bagian dari Asia Tenggara yang berbatasan dengan Kamboja ,Myanmar dan Malaysia . Ibu kota Thailand berpusat di kota Bangkok selain itu negara ini terkenal dengan sebutan negara gajah putih . kuil dan monumen budaya .Thailand menggunakan sistem pemerintahan berupa kerajaan dan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang pertama menggunakan sistem demokrasi . Thailand adalah negara Monarki konstitusional dengan Raja sebagai kepala negara . Raja di tugaskan untuk menjalankan otoritas melalui Majelis Nasional, Dewan Menteri dan Pengadilan . Monarki sendiri tercampur kedalam sela-sela politik Thailand selama kurang lebih dua dekade .

Di tahun 1932 monarki absolut digulingkan oleh kelompok kecil terdiri dari militer dan sipil yang di pimpin oleh Phibun Songkram dan Pridi Phanomyong . Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok yang berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta militer dan mengubahnya dari monarki absolut ke monarki Konstitusional . Thailand mempunyai sejarah panjang terkait kudeta militer sejak tahun 1932 . Negara gajah putih ini telah mengalami 19 kali kudeta sebanyak 12 diantaranya berhasil . Peristiwa panjang mengenai intervensi militer antara dominasi militer. Hubungan sipil dan militer yang demokratis berarti militer berada di bawah pemerintahan sipil dan terpilih secara demokratis melalui berbagai mekanisme konstitusional dan institusional .

Pada 21 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan pemilihan umum di bulan Februari . Pembatalan tersebut sesuai dengan Konstitusi 2007 yang mana harus dilaksanakan pada waktu bersamaan . Mahkamah Konstitusi memaksa Yingluck Shinawatra dan sembilan Perdana Menteri untuk mengundurkan diri pada 7 Mei 2014 . Yingluck Shinawatra adalah Perdana Menteri wanita pertama di Thailand sekaligus adek dari Thaksin Shinawatra . Perdana Menteri Yingluck telah melakukan sebuah tindakan kriminal menyalahgunakan kekuasaannya untuk membeli padi ke petani dengan jumlah besar lalu membayar mereka sekitar 50% dari harga pasar . Militer Thailand yang terdiri dari angkatan darat Kerajaan , angkatan laut dan angkatan udara Kerajaan sudah menjadi aktor utama . Militer juga terlibat dalam menyelesaikan konflik di Thailand selatan dari etnis Melayu . Serangkaian kudeta sepanjang sejarah Thailand modern telah menghasilkan suatu organisasi yang sangat kuat dan politisi maka dibutuhkan kontrol sipil terhadap militer.

Kerangka Teori

Konsep Pretorianisme

Pemikiran teoritis oleh Amos perlmutter yang dikembangkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya tahun 1957 yaitu *The soldier and the state* . Inti dari pandangan tersebut adalah berubahnya korps perwira militer dari bentuk “ penakluk “ menjadi kelompok profesional . Pada abad kesembilan belas dan abad keduapuluh intervensionisme politik oleh tentara banyak terjadi di beberapa negara . Kejadian ini membuktikan kuatnya fakta sejarah dan politik bahwasannya pemerintah sipil tidak efektif dan tidak berlembaga .

Pretorianisme Historis

Sebuah pasukan kecil tentara yang terdapat di ibu kota kerajaan serta melayani keabsahan kerajaan dengan membela senat . Menurut teori Weber , Pretorianisme dianggap sebagai dominasi honoratiorees . Pretorianisme ini merupakan suatu kekuasaan yang diterapkan pada kelompok manorial (ksatria) atau kelompok patrimonial .

Pretorianisme Modern

Di negara terbelakang fungsi tentara nyari mirip dengan yang sedang berlaku di negara Patrimonial dan bertindak sebagai pusat kekacauan politik , ambisi politik dan ancaman terhadap kekuasaan sah. Negara pretorian modern adalah suatu negara dimana berkembang dengan adanya kecenderungan atas campur tangan dalam pemerintahan dan memiliki potensi untuk mendominasi badan eksekutif . Kehadiran tentara dalam masalah sipil merupakan petunjuk akan adanya wabah korupsi .

Pembahasan

Di tahun 1932 monarki absolut di gulingkan oleh sebuah kelompok kecil yang terdiri dari militer dan sipil. Kelompok kecil tersebut di pimpin oleh Phibun Songkram dan Pridi Phanomyong yang mana mereka berhasil merebut kekuasaan dalam kudeta militer tersebut . Setelah merebut kekuasaan lalu mereka mengubah dari sistem monarki absolut menjadi sistem monarki konstitusional. Akibat terjadinya kudeta yang terus-menerus makanya politik Thailand berada di posisi stabil dibawah antiroyalis jenderal Phibun Songkram . Revolusi Monarki tahun 1932 berhasil dikarenakan adanya dukungan oleh militer yang dipimpin oleh Perwira nonroyal.

Pada tahun 1938 Phibun Songkram terpilih menjadi perdana menteri dan kembali merebut kekuasaannya kembali . Phibun Songkram pun selaras dengan jepang selama perang dunia II lalu mengubah dari Siam ke Thailand yang di harapkan dari perubahan nama tersebut adalah membalikan sejarah singkat nama siam selama masa pemeritahan sipil di tahun 1940an. Pengaruh politik dari sistem monarki sampai kedalam kerajaan dan mereka pun telah menolak tindakan penindasan yang di dilakukan oleh pemerintahan di bawah pimpinan Phibun atas aktivitas monarkinya . Raja Bhumibol merupakan seorang Raja konstitusional di Thailand tidak seperti kebanyakan negara terjajah di Asia Tenggara, selain itu juga mempertahankan seorang raja konstitusional.

Phibun Songkram dikenal karena menyediakan negara yang sebelumnya disebut dengan Siam di antara lainnya dan nama saat ini (Thailand) digunakan untuk mempromosikan etnis sebagai identitas. Tindakan yang dilakukan Phibun Songkram paling jelas menunjukkan peran penting militer dalam menempa suatu identitas nasional dari penduduk kerajaan. Tahun 1980an peregang demokrasi pun terlihat dan lebih panjang sementara intervensi mulai jarang terjadi. Ditandai dengan konflik berkepanjangan antara aliansi kaos merah sebagai pendukung perdana menteri Thaksin Shinawatra yang sebagian berasal dari Thailand pedesaan, utara serta timur laut. Partai politik yang terkait dalam hal tersebut adalah Pheu Thai. Aliansi dari kelompok lain dikenal sebagai kaos kuning yang mencakup elite tradisional, kelas menengah perkotaan dan beberapa pemimpin dari partai lain (Partai Demokrat).

Bulan Januari 2001 diadakannya pemilihan parlemen yang mana Partai Thai Rak Thai mendominasi. Thaksin seorang pendiri dari Partai Thai Rak Thai lalu pindah ke pusat politik di Thailand dan sebagai pengusaha yang sangat sukses serta pendiri perusahaan telekomunikasi terbesar. Thaksin sangat populer di daerah pedesaan. Jaringan politiknya pun mendapat banyak dukungan dari komunitas bisnis di Thailand. Awal tahun 2005 diadakannya pemilihan dan Partai Thai Rak Thai memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Kemenangan tersebut adalah hal yang terjadi pertama kalinya di Thailand dalam pemilihan terbuka meskipun Thaksin berada di posisi untuk membentuk sebuah politik di masa mendatang.

Pada tahun 2006 politik Thailand mengalami perubahan pola yang tidak beraturan dimana militer telah melakukan kudeta sebanyak 2 kali dan membatalkan 2 konstitusi. Dua konstitusi tersebut oleh Raja telah disetujui charter interim dan satu konstitusi “permanen” selain itu pengadilan juga membubarkan empat partai politik, Pada 19 september 2006 ketika angkatan darat kerajaan Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih Thaksin Shinawatra sebagai perdana menteri dan pengambilan alih. Thaksin pergi mengasingkan diri dengan adanya paksaan untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi meskipun itu dia tetap mempengaruhi perpolitikan Thailand dari Luar negeri.

Thaksin merupakan perdana menteri pertama yang di pilih kembali dalam sejarah Thailand. Politikanya pun menjangkau di kalangan masyarakat pedesaan di wilayah timur dan utara yang mana mewakili mayoritas penduduk. Keluarganya pun berada di kota utara dari Chiang Mai. Thaksin mempengaruhi politik mereka melalui kebijakan populis yang bertujuan mengurangi kemiskinan pedesaan yaitu dengan cara menyediakan dana pengembangan kredit

mikro dan perawatan kesehatan universal . Keluarganya pun berada di kota utara dari Chiang Mai. Thaksin mempengaruhi politik mereka melalui kebijakan populis yang bertujuan mengurangi kemiskinan pedesaan yaitu dengan cara menyediakan dana pengembangan kredit mikro dan perawatan kesehatan universal .

Pada Februari 2010 pemerintahan di bawah pimpinan Abhisit menyita kurang lebih hampir 50 miliar bahts aset milik mantan Perdana Menteri sebelumnya yaitu Thaksin Shinawatra. Hal tersebut mendorong Thaksin segera mengajukan permohonan kepada para pendukungnya selain itu mungkin menyebabkan paling cepat dari keputusan UUD guna melakukan aksi protes. Thaksin juga di tuduh tidak nasionalis di karenakan menjual saham The Shin corp kepada negara Singapura dan di tambah dengan penjualan saham perusahaan milik keluarga yang dibebaskan dari suatu pajak sehingga mempunyai keuntungan baginya .

Selama mobilisasi politik dari Maret hingga Mei 2010 Thailand mengalami konfrontasi paling keras sejak terjadinya protes pada tahun 1992 . Sejak terjadinya aksi protes tersebut setidaknya 90 orang tewas dan lebih dari 2.000 terluka dalam aksi bentrok antara pasukan keamanan dan para demonstran anti pemerintah.

Evolusi partai politik di Thailand telah mengkonfrontasi sebagian permasalahan yang sama hal di negara lain . Pembentukan partai politik telah terjadi meskipun hanya dengan gerakan ke arah terbelakang pemilihan dan pembentukan badan legislatif yang representatif di tingkat nasional. Kelompok revolusioner kecil telah menggulingkan monarki absolut di bulan Juni 1932 yang mana mereka menyebut dirinya sebagai “Partai Rakyat” atau “Promotor” Kesadaran terhadap politik sangat kurang hal itu menyebabkan kerajaan Thailand membuat sebuah organisasi politik bergaya barat . Partai Rakyat pun secara konsekuen di bubarkan dan partai politik secara resmi di larang saat itu .

Kekuatan politik dilakukan oleh para pemimpin militer dengan mengandalkan kontrol mereka terhadap angkatan bersenjata terutama Angkatan Darat Kerajaan. Sejak berakhirnya kedudukan jepang maka partai politik terorganisir muncul sebanyak tiga kali dan upaya dalam menetapkan bentuk konstitusional pemerintah . Pemerintah akhirnya mengesahkan undang-undang mengenai partai politik agar banyak kelompok politik yang terorganisir bersaing dalam kursi terpilih di legislatif nasional. Perdana menteri Pribun Songkhram mengandalkan ex politiknya yang ekstensif perasaan serta hubungan kekeluargaan dengan amerika .

Sejak tahun 1945 partai tersebut telah berubah menjadi Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan salah satu partai oposisi yang dipimpin oleh para pemimpin politik dan memiliki administrasi tingkat atas. Partai Demokrat merupakan partai tertua dan cukup banyak gelar di Thailand serta orientasi politiknya relatif moderat dan mempunyai tujuan utama yaitu mengubah kepemimpinan pemerintah dibanding kebijakannya.

Pada akhir 1980an sistem partai politik di Thailand makin berkembang dan berada pada tahap transisi yang cukup rumit dari status sebelumnya sebagai tambahan bagi pembentukan birokrasi . Politik partai mendapatkan dorongan yang besar dari pemberontak mahasiswa pada bulan oktober 1973. Pada 1975 sebanyak empat puluh dua partai berpartisipasi dalam pemilihan parlemen dan tiga puluh sembilan di tahun berikutnya.

Diantara september 1992 dan April 2006 semua pemerintahan dibentuk oleh partai yang mayoritas menduduki parlemen . Meskipun demikian tidak ada partai tunggal memperoleh mayoritas dalam pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 1992,1995 dan 1996. Partai Demokrat mempunyai banyak keluhan dengan partai yang di pimpin oleh Thaksin Shinawatra dan dianggap sebagai beban terhadap beberapa tagihan pengeluaran , prosedur pemberian suara di parlemen. Partai Demokrat telah memenangkan pemilihan umum selama tiga dekade yang lalu pada tahun 1992 . Namun sejak munculnya Partai Pheu Thai kepopuleran partai tersebut kalah .Demokrat pun masih mempertahankan basis kekuataannya di bagian selatan.Partai Pheu Thai (PTP) merupakan partai baru untuk faksi politik lama serta telah memenangkan disetiap pemilihan nasional yang diadakan pada tahun 2001 dan seterusnya sebanyak enam kali. Selama periode tersebut Keluarga Shinawatra telah di paksa untuk berkuasa sebanyak tiga kali oleh pendiri politik konservatif.

Angkatan Darat milik kerajaan Thailand merupakan yang paling tua dan terbesar serta secara tradisional berfungsi sebagai sistem pertahanan kerajaan . Memiliki Panglima tertinggi dan staf spesialis militer yang berkedudukan di pusat kota Bangkok. Misi utama dari tentara adalah mempertahankan negara dari agresi oleh pasukan darat asing selama bertahun – tahun invasi dianggap tidak mungkin oleh para pemimpin sipil dan militer. Pada saat pembentukan militer profesional yang terlatih secara teknis adalah sebuah pencapaian penting dari adanya reformasi modernisasi yang digunakan pada akhir abad ke 19. Pada tahun 1920an militer telah muncul sebagai institusi pemerintahan paling kuat juga termasuk banyak perwira yang telah bangkit karena adanya pelatihan dan kemampuan .

Militer Thailand selalu terlibat dalam hal politik baik melewati kudeta maupun dengan cara lain . Dalam seratus tahun terakhir telah terdapat 19 upaya kudeta yang mana 11 diantaranya mengalami keberhasilan dan 3 diantaranya dihitung sebagai penggulingan atau perubahan monarki absolut menjadi monarki konstitusional . Militer tidak seperti kebanyakan negara di dunia yang lebih dari sekedar penyedia pertahanan nasional. Hal tersebut dirasakan oleh kalangan publik sebagai pembela raja dan kebanggaan nasional . Militer Thailand sering menghindari situasi dimana memiliki potensi berbahaya sebagai gantinya perwira lebih suka mengabdikan energi untuk profesi bisnis serta politik. Sejak berakhirnya peristiwa penggulingan dan pergantian kekuasaan dari monarki absolut ke monarki konsitusional pada tahun 1932 mengakibatkan kerapuhan lembaga perwakilan dan apatisme politik publik.

Angkatan bersenjata bukan hanya peduli terhadap pertahanan nasional saja tetapi juga dengan dimensi dari dalam keamanan nasional antara lain stabilitas politik. Pada tahun 2006 tentara memiliki sebuah alasan khusus untuk berpartisipasi . Pihak Thaksin pun berusaha untuk memimpin tentara yang di bawah kendalinya . Kecenderungan Thailand untuk melakukan sebuah kudeta dikarenakan militer selalu memainkan peran utama dalam politik serta demokrasi . Ketika jenderal Prayuth Chan-Ocha mengumumkan darurat militer tetapi pihak militer mengklaim bahwa itu bukanlah kudeta. Satu- satunya negara di dunia yang masih di bawah kekuasaan militer formal dan berada di bawah tekanan meningkat baik dari dalam maupun luar negeri untuk kembali ke pemerintahan sipil.

Pemilu pada 3 Juli 2011, Partai Pheu Thai memenangkan suara dengan mendapatkan sekitar 3-4 juta suara lebih banyak di banding Partai Kekuatan Rakyat dalam pemilihan 23 Desember 2007. Partai Demokrat memperoleh hampir kurang lebih 1 juta suara. Perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa Partai Pheu Thai memperoleh suatu kemenangan telak di wilayah Utara dan Timur laut sedangkan Partai Demokrat jelas di dukung dari Selatan. Pada bulan Juli 2011 Partai Pheu Thai (PTP) yang di pimpin oleh Thaksin Shinawatra Jumlah Partisipasi pemilih pada saat itu mencapai rekor tertinggi sekitar 75 persen .Dalam kampanyenya itu Yingluck mampu memanfaatkan situasi atas kekhawatiran ekonomi yang sedang berkembang. Yngluck berjanji akan menghidupkan kembali kebijakan populis di era Thaksin Shinawatra . Kebijakan populis itu ditunjukkan bagi pemilih yang berpenghasilan rendah .

Yingluck selaku perdana menteri dan adek dari Thaksin berjanji untuk dapat memulihkan subsidi pemerintah sebelumnya untuk beras di bawah yang di sebut dengan “

Hipotek beras”. Hipotek beras merupakan sebuah program dimana pemerintahan membeli beras dari petani di above market lalu menjualnya di pasar. Yingluck berjanji untuk menaikkan upah minimum . kedua kebijakan tersebut dapat menciptakan kekhawatiran di komunitas teknokrat dan bisnis di Thailand . Perekonomi takut akan program gadai beras akan membuat harga beras terlampaui tinggi di pasar global .

Yingluck memberlakukan kebijakan baru yaitu mendistribusikan kekayaan dari pembayar pajak untuk mempersempit kelompok kepentingan khusus dan bukan orang miskin. Beras merupakan produk pertanian yang sangat penting bagi masyarakat Thailand. Beras juga menjadi produk utama yang di ekspor selama satu dekade .Thailand adalah Negara pengekspor beras terbesar di dunia dengan volume eksportnya menduduki peringkat pertama untuk waktu tiga dekade sejak 1982 dan menyumbang 30 persen pada perdagangan beras dunia antara tahun 2003-2007 . Peringkat Thailand pun mengalahkan India dan Vietnam jauh di belakangnya .

Ketika menjadi Perdana Menteri Yingluck mengambil kembali kebijakan tersebut secara ekstrem guna memenangkan pemilu tahun 2011 .Yingluck mengambil kembali kebijakan tersebut dan berjanji terhadap program tersebut . Selama periode 2011-2012 perdana menteri Yingluck Shinawatra mengeluarkan sebuah “kebijakan Berikutnya Beras” dimana pemerintah mengumumkan rencana untuk membeli beras dari petani di atas harga pasar. Kebijakan Thailand tampaknya di tunjukan untuk menaikkan harga global dengan menghapus jumlah pasokan dari pasar global sementara . Perdana menteri Yingluck Shinawatra di tuduh mencoba “memanipulasi pasar beras global dengan cara membeli persediaan” . Skema dari pemenuhan beras oleh pemerintah adalah membayar sebanyak 50% diatas harga tanpa adanya batasan jumlah stock .

Ketika program tersebut pertama kali diluncurkan di tahun 2011 , saat harga tertinggi disitulah pemerintah membeli beras dari petani negara dengan harga 15.000 Baht (nasi putih) hingga 20.000 Baht (padi harum) atau \$ 486 per ton sekitar 50% lebih tinggi dari harga pasar global. Adanya kebijakan tersebut tidak benar akan membawa keuntungan bagi para petani . Skema kebijakan ini di beruntukkan kepada petani dan diantara petani kaya akan mendapatkan manfaat cukup besar.

Pada tahun 2011 jumlah pasokan beras yang berada di tempat penyimpanan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 12,5 juta ton . Potensi kerugian yang di capai bagi pemerintah dapat mencapai 5 persen dari GDP negara Thailand. Berbagai upaya untuk

mengurangi pembatasan beras telah di rencanakan agar biaya tetap terkendali . Selain meningkatkan biaya terdapat masalah lain yaitu adanya korupsi.Pada akhir November ketika Partai Demokrat sedang mengajukan suara tidak percayanya parlemen terhadap Yingluck Shin awatra dan menuduh penyalahgunaan suatu program serta kurangnya transparansi .

Pemerintahan Yingluck pun mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar petani dengan harga yang sudah dijanjikan sebelum pemilihan umum tahun 2011. Meskipun hal itu mendorong para petani untuk membawa masalah ini ke jalan-jalan (demonstrasi) selain itu membawa dampak buruk terhadap kelas menengah di perkotaan dan menyebabkan mereka terlibat dalam protes tersebut .Pada tahun 2013-2014 skema kebijakan tersebut di rancang guna memperdayakan petani padi secara finansial tetapi hal tersebut malah melemahkan nilai kompetatif beras Thailand dan dianggap sebagai bentuk korupsi.

Yingluck Shinawatra merupakan boneka Thaksin yang mana bekerja semata-mata hanya untuk memastikan keputusannya dari tempat pengasingannya di Dubai .Pada akhir November 2013 negara Thailand menghadapi sebuah ketegangan politik yang mana ketika puluhan ribu pendemonstran anti pemerintahan memenuhi pusat kota Bangkok guna menekan pemerintah untuk melakukan pengunduran diri . Para demonstran anti pemerintahan itu berbaris di depan gedung-gedung pemerintah dan di perkirakan berjumlah sekitar 100.000 orang meminta pemerintahan perdana menteri Yingluck Shinawatra untuk mengundurkan diri .

Pada tahun 2014 diawali dengan adanya aksi protes politik dengan skala besar dan terus berlanjut oleh Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) sejak November 2013.Sebagai lembaga pemerintah dilarang masuk dan pejabat pun di minta tidak untuk datang bekerja hal itu merupakan bentuk protes terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Yingluck Shinawatra . Demonstrasi yang terjadi di Thailand ini di picu adanya penolakan publik atas RUU amnesti dengan cakupan luas lalu disahkan oleh parlemen .

Di provinsi bagian timur laut Khon Kaen merupakan kubu dari Shinawatra dan pemimpin gerakan kaos merah tersebut mengatakan bahwa para pendukungnya merasa frustrasi .ront Bersatu untuk Demokrasi melawan Kediktatoran sering disebut dengan kaos merah . Kaos merah merupakan pro terbesar dalam gerakan demokrasi dalam sejarah negara Thailand sekaligus aktivis sosial yang percaya bahwa rakyat layak mendapatkan politik serta menjamin mereka atas hak asasi manusia .

Kaos merah merupakan pendukung dari Shinawatra dan berpusat di sekitar Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) . Selain itu mendapatkan dukungan dari beberapa akademisi terkemuka dan aktivis sosial . UDD dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan kekuatan melawan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) anti Thaksin .Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada 26 Januari 2014 dan berjalan dengan lancar di kubu partai yang memerintah di provinsi bagian utara . Selama berjalannya pemilihan umum itu para pemrotes anti pemerintah mengganggu sebagian besar suara di kota Bangkok .

Negara Thailand pun tersiksa akan gejolak yang sedang terjadi karena aksi protes terhadap pemerintahan (kaos kuning) pada gilirannya mobilisasi itu di picu oleh demonstrasi dengan skala besar yang di lakukan demi pemerintahan (Kaos merah) . Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Mahkamah konstitusi pemilihan umum bulan Februari 2014 di batalkan .Pembatalan tersebut di lakukan ke Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peraturan Konstitusi 2007. Peristiwa politik pun tidak hanya berhenti di situ saja proses pun berlanjut tepatnya pada tanggal 22 Mei Militer mengambil alih kekuasaan guna memulihkan ketertiban¹ .Pada tanggal 22 Mei 2014 Jenderal Prayuth Chan ocha sebagai kepala dari Royal Thai mengumumkan sebuah kudeta untuk menyelesaikan krisis politik berupa proses pengusuran pemerintahan di bawah pimpinan Partai Pheu Thai .

NCPO menyatakan pada 23 Mei 2014 akan di lakukan reformasi nasional “ekonomi, sosial dan politik” sebelum dilaksanakan pemilihan umum . Adanya reformasi nasional maka dari itu Dewan Reformasi dan Majelis Nasional akan di bentuk guna bekerja. Selama satu tahun pasca terjadinya kudeta dari 22 Mei 2014 hingga 22 Mei 2015 setidaknya kurang lebih 751 orang telah dipanggil oleh NCPO. Panggilan itu dilakukan melalui berbagai cara antara lain menyiarkan nama-nama di radio , Tv serta saran informal lainnya .Junta militer telah menangkap 21 orang di bagian utara khon kaen yang mereka curigai sebagai militan dari kaos merah dan terdapat bukti lain di antaranya tiga granat ,bom asap,amunisi dan tabung gas.

Militer telah mendeklarasikan Hukum Darurat Militer secara nasional pada 20 Mei 2014 dibawah kekuasaan UU Darurat Militer B.E 2457(1914)(MLA).Penggunaan Hukum Darurat Militer digunakan untuk menggagalkan kerja dari NCPO di markas besar tentara Kerajaan Thailand pada 17 Juli 2014. Pada 21 Agustus 2014 , 191 anggota Dewan Legislatif Nasional akhirnya menyetujui Jenderal Prayuth Chan-Ocha sebagai perdana menteri baru sementara mengizinkan untuk mempertahankan kepemimpinan dari otoritas militer . Tiga

bulan setelah kudeta militer 22 Mei 2014 junta pun terus melakukan tindakan keras terhadap mereka yang melaksanakan haknya serta kebebasan fundamental dan tidak membuat kemajuan nyata menuju pemulihan pemerintahan demokratis .

Militer merupakan suatu kekuatan konstan yang berjalan berada dibelakang pemerintahan. Militer dengan Raja telah mewujudkan sebuah identitas nasional negara Thailand yang berupaya untuk menjadi demokratis modern . Berdasarkan peristiwa yang terjadi sekitar enam puluh tahun terakhir militer secara mayoritas mengambil sebuah peran seperti ayah . Peran ayah disini merupakan seolah-olah menyelamatkan atau melindungi negara Thailand dari tindakan korupsi , pembubaran internal ,atapun ancaman anti monarki.

Hubungan militer dengan sipil dapat dicirikan oleh kebangkitan dalam mempengaruhi politik di Thailand sejak adanya kudeta.Pengaruh militer dalam politik dapat di tunjukan dengan adanya penggulingan perdana menteri atas perintah dari pengadilan.Hubungan militer dengan sipil dianggap sebagai kontinum didalam pengambilan keputusan melalui kontrol dari sisi yang berlawanan . Hal itu berupaya untuk memperkuat kontrol sipil , meningkatkan transparansi , mengurangi tindak korupsi , meningkatkan sektor pengadilan dan sebagainya .Militer Thailand telah memainkan peran penting dalam keamanan eksternal negara serta keterlibatan politik domestiknya yang menyebabkan keterbatasan guna membela negara .

Pada tahun 1957 menyusul kudeta lain dan aliansi baru antara satu faksi militer serta monarki mengambil alih Thailand . Penindasan militer di tahun 1992 mencemar citra angkatan bersenjata dan memungkinkan terjadinya demokrasi lagi . Hal ini mengarah pada pemilihan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di tahun 2001 tetapi beberapa elit dan pejabat militer senior khawatir akan menjadi suatu ancaman bagi aristokrasi . Pada awal Mei 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Yingluck telah melakukan penyalahgunaan atas kantornya dengan cara memindahkan pegawai negeri sipil ke pekerjaan lain di tahun 2011 lalu di paksa untuk mengundurkan diri . Salah satu alasan dilakukannya kudeta 2014 adalah untuk menghentikan korupsi oleh pemerintahan Yingluck Shinawatra .

NCPO memulai suatu proses guna mengembalikan negara Thailand ke demokrasi yaitu dimana Majelis Legislatif Nasional (NLA) yang didominasi oleh militer serta National Reform Steering Assembly (NRSA) untuk memilih Komite Penyusunan Konstitusi (CDC).Pada Mei 2014 Prayuth Chan-ocha mengambil alih guna menghindari konflik sipil

dan untuk menyingkirkan negara ini dari korupsi . Janji untuk membersihkan tidak sepenuhnya baru tetapi telah digunakan oleh pemerintahan .

Di bawah pemerintahan militer,peradilan dan badan – badan independen atau semi hukum lainnya termasuk Komisi Antikorupsi Nasional , Kantor Auditor Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional diberi lebih banyak kekuasaan dan Komisi Pemeriksaan Aset baru (AEC) telah dibuat . Di Thailand komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) di bentuk pada tahun 1999 saat itu sedang mengalami tekanan dalam situasi politik yang cukup tegang dikarenakan penyelidikan korupsi di pasar besar .NACC mempunyai kekuatan investigasi yang sangat luas tetapi sebenarnya tidak ada hak wewenang untuk mengadili kejahatan dan merujuk kasus tersebut kepada jaksa penuntut umum . Diwaktu secara bersamaan NACC dapat mengirim laporan ke pihak senat guna menentukan apakah dapat melakukan tindakan kriminal kepada pejabat yang melanggar.

Vicha Mahakun mengatakan bahwa NACC telah menemukan penyimpangan yang berasal dari kebijakan Perdana Menteri Yingluck berupa kebijakan skema beras dan memberi peringatan kepada pemerintahannya secara tertulis sebanyak dua kali .Komisi anti korupsi resmi menyatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra atas kasus mengenai skema subsidi beras oleh pemerintah.Pada 19 Mei Perdana Menteri Yingluck akhirnya hadir di pengadilan para pendukungnya pun juga hadir dalam persidangan . Didalam pengadilan tersebut Yingluck mengaku tidak bersalah atas tuduhan mengenai skema penanaman beras . Selain dia dituduh melalaikan tugas yaitu untuk menghentikan korupsi yang mana mengakibatkan kerugian pembayaran pajak sebesar US \$ 15 miliar .

Kesimpulan

Pada tahun 1932 terjadi penggulingan sistem monarki absolut ke monarki konstitusional yang dilakukan oleh kelompok kecil . kelompok kecil tersebut terdiri dari militer dan sipil yang di pimpin oleh Pridi Phanomyong dan Phibun Songkram . Sejak saat itulah awal mula kudeta terjadi hingga sekarang . Militer pun mempunyai peran dalam kegiatan politik Thailand . Pada tahun 2001 pemilihan umum di laksanakan dan dimenangkan oleh partai Demokrat . Partai Demokrat merupakan Partai tertua di Thailand .

Pada tahun 2006 Thaksin terpilih kembali dalam sejarah perpolitikan di Thailand. Selama masa jabatan dia selalu dituduh melakukan tindakan korupsi dengan skala besar . Pada tahun 2010 pemerintahan di bawah Perdana Menteri Abhisit menyita kurang lebih

hampir miliar baht aset milik Thaksin Shinawatra . Sejak saat itulah terjadinya demonstran yang dilakukan oleh pro Thaksin atau Kaos merah . Para demonstran melakukan aksi protes guna menuntut Perdana Menteri Abhisit untuk mundur dari kursi jabatannya . Selain itu Thaksin di tuduh tidak nasionalis dikarenakan menjual saham The Shin Corpnya kepada negara Singapura . Peristiwa di tahun 2006 berujung penggulingan Perdana Menteri Thaksin

Pada tahun 2011 dilaksanakannya pemilihan umum yang mana dimenangkan oleh Yingluck Shinawatra sekaligus saudara dari Thaksin . Selama masa pemerintahannya dia mempunyai kebijakan skema penanaman padi yaitu membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal . Selama periode tahun 2011-2012 skema penanaman padi mengalami kerugian yang cukup besar bagi negara Thailand dan dianggap terjadinya korupsi . Para pemerintahan pun pada akhirnya tidak dapat membayar . Pada awal Mei terjadilah kudeta militer dengan tujuan melakukan penggulingan terhadap Yingluck . Militer sendiri mempunyai peran sebagai penyelamat bangsa dikarenakan negara Thailand sering terjadi Konflik kudeta yang mana disebabkan adanya tindakan korupsi dan dapat menyebabkan kerugian besar .

References

- Chaisukkosol , C. (n.d.). A New Social Contract : The Way out for Thailand's Political Transformation Crisis. *Friedrich Ebert Stiftung* , 2.
- Biswas, A. K., J. M., & Tortajada, C. (2015, May 21). *The Rice and fall of Yingluck Shinawatra* . Retrieved from The Diplomat: thediplomat.com
- Bungbongkarn, S. (1998). The Military and democracy in Thailand. *Jstor*.
- Charles, K. F. (n.d.). *Attempts to institute populist democracy Thaksin Shinawatra*. Retrieved from Encyclopedia Britannica : www.britannica.com
- Chen, M. (2016). *Country Report: Thailand*. Canvas.
- Dalpino, C. (2012). *Thailand in 2011 High Tides and Political Tension*. California: University of California press.
- Darling , F. C. (1971). Political Parties in Thailand. *Jstor*, 229-236.
- Funston , J. (2001). *Government and politics in Southeast Asia* . Singapore : Institute of Southeast Asian studies.

- Ginsburg, T. (2009). Constitutional afterlife: The continuing impact of Thailand's postpolitical constitution. *International journal of constitutional law*.
- Haller, E. (2014, January 29). *In the name of the people? political protests in Thailand and the underlying conflict*. Retrieved from Heinrich Boll Stiftung : www.boell.de
- Hearn, C. (2008). *the 2006 coup in Thailand lessons for emerging democracies*. Amerika : United State Army Reserve.
- Inganannat , M. (n.d.). *Showcasing notorious Thailand Corruption cases*. Retrieved from Censere: www.censere.com
- Jackson, G. (n.d.). Thailand and the 2006 coup. *Nordic intitute of Asian studies*.
- Kenzie, M., & Baker. (2015). *Doing business in Thailand*. Bangkok.
- Keyes , C. (n.d.). Democracy Thwarted : The crisis of political authority in Thailand. *Iseas*.
- Keyes, C. F. (n.d.). *Attempts to intitute populist democracy Thaksin Shinawatra* . Retrieved from Britannica: www.britannica.com
- Kudeta militer di Thailand* . (2014, Mei 22). Retrieved from BBC : www.bbc.com
- Lindman , L. N. (2017). Military coups in Thailand: The strategic Arguments to justify a Democratic Setback. *Departement of Government uppsala university*.
- Manikas , P. M. (2003). *Political parties in Asia*. Amerika : National Democratic Institute for internastional Affairs.
- Nehru, V. (2012, Mei 30). *Thailand's rice policy gets sticky* . Retrieved from Carnegie endowment for international peace : carnegieendowment.org
- Paramacon, N. (2014). Rice Production, Price and Related Policy in Thailand. *International journal of business and sosial science*.
- Partial democracy and the search for a new political order*. (n.d.). Retrieved from Britannica: www.britannica.com
- Perlmutter, A. (1977). *Militer dan politik*. London: Yale university press.
- Permani , R., & Vanzentti, D. (2014). Rice mountain : Asseessment of the Thai rice pledging program. *Australia Agricultural & resource economics society*, 2.

- Phakdeewanich, T. (2018, Januari 10). *Can Thailand rely on the Democrat Party for Democracy?* Retrieved from The Nation : www.nationmultimedia.com
- Profile : Red Shirts.* (2013, November 3). Retrieved from Aljazeera: www.aljazeera.com
- Ramirez, M. (2017, September 21). *Thailand :Anti corruption compliance.* Retrieved from Global investigation: globalinvestigationreview.com
- Royal Thai Army.* (2014, Mei 22). Retrieved from Global Security : www.globalsecurity.org
- Sinaga, L. C. (2010, Desember 2010). *Jalan panjangn demokrasi Thailand.* Retrieved from Pusat penelitian politik: www.politik.lipi.go.id
- Stout, D. (2014, Mei 22). *Thailand :Coups That Helped Shape the Land of Coups.* Retrieved from TIME: time.com
- Thai red shirt protest againts Thai government 2010.* (2010). Retrieved from ncdatabase.swarthmore.edu
- Thailand : Attitude Adjusmen: 100 days under martial law.* (2014, September 11). Retrieved from Amnesty: www.amnesty.org.uk
- Thailand: Junta leader named prime minister.* (n.d.). Retrieved from Human Right Watch: www.hrw.org
- Thailand's 2010 Red Shirt Protests and the Government Crackdown.* (2011, Mei 3). Retrieved from Human Right Watch: www.hrw.org
- Thompson, N. (2018, Mei 23). *Thailand"s Junta Cracks Down on Thaksin"s Pheu Thai Party* . Retrieved from The Diplomat : thediplomat.com
- Wanichakorn , W. (2014, Mei 22). *Thailad:coups that helped shape the land of coups.* Retrieved from Time: time.com

